



Dinamika usaha penangkapan ikan Pulau Sapeken 1904-1914

Dynamics of Sapeken Island fishing business 1904-1914

Fajar Nugroho

ajankboyz3@gmail.com

Universitas Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9, Tondo, 94118, Palu Sulawesi Tengah

Corresponding email: ajankboyz3@gmail.com

ARTICLE INFO

Received: March 29, 2023

Revised: June 12, 2023

Accepted: June 14, 2023

Published: June 30, 2023

Permalink/DOI

10.17977/um020v17i12023p66-80

Copyright © 2023.

Sejarah dan Budaya

Email: jsb.journal@um.ac.id

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

How to Cite APA Style:

Nugroho, F. (2023). Dinamika usaha penangkapan ikan Pulau Sapeken 1904-1914. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), 66-80.

<https://dx.doi.org/10.17977/um020v17i12023p66-80>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license.

ABSTRACT

Fisheries is one of the two non-agricultural sectors that played an important role in the economy of the people of Sapeken Island in the late 19th to early 20th centuries. This study aims to explain that the role of the fishing elite (owners of capital and moneylenders) succeeded in bringing the fishing business sector to fish in the direction of growth. But on the other hand, the existence of this group makes fishermen bound to the monopoly system they control. The method used in this study is the historical method, namely topic selection, heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The findings produced in this study are that the fisheries sector is a place of business for the elite group of fishermen, they control and dominate this sector starting from the provision of capital, equipment, production, and distribution of fish trade. This condition ultimately results in fishermen not being able to develop their own business network, so that the productivity of the fishing effort becomes erratic.

KEYWORDS

fisherman; fish catching; fisheries; Sapeken

ABSTRAK

Perikanan merupakan salah satu dari dua sektor di luar pertanian yang memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat Pulau Sapeken pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bahwa peran kelompok elit nelayan (pemilik modal dan pelepas uang) berhasil membawa sektor usaha penangkapan ikan ke arah pertumbuhan. Namun di sisi lain, dengan adanya kelompok tersebut membuat para nelayan menjadi terikat terhadap sistem monopoli yang dikendalikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yakni pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sektor perikanan menjadi tempat ladang bisnis bagi kelompok elit nelayan, mereka menguasai dan mendominasi sektor ini mulai dari penyediaan modal, peralatan, produksi, dan distribusi perdagangan ikan. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan para nelayan tidak dapat mengembangkan jaringan usahanya sendiri, sehingga produktivitas usaha penangkapan ikan menjadi tidak menentu.

KATA KUNCI

nelayan; penangkapan ikan; perikanan; Sapeken

PENDAHULUAN

Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah kepulauan hampir sebagian besar penduduknya menitikberatkan pada sektor usaha perikanan dan kelautan. Pada abad 19 Pulau Sapeken merupakan desa-desa nelayan yang keseharian masyarakatnya selalu melakukan usaha penangkapan ikan, para nelayan umumnya memanfaatkan peran Selat Madura, Laut Jawa (Tjiptoatmodjo, 1983), dan perairan di kepulauan sebelah Timur Pulau Madura sebagai media alam dalam mencukupi kebutuhannya, baik untuk lokasi penangkapan ikan maupun penghubung terhadap pusat dagang atau daerah pemasarannya (Utomo, 2017).

Penangkapan ikan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pada dasarnya menawarkan suatu landasan ekonomi yang kuat, melalui organisasi usaha penangkapan ikan yang baik mampu membuat nelayan sejahtera. Pertumbuhan usaha penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh adanya investasi modal yang cukup dan adanya pemasaran produksi ikan yang lancar. Sektor perikanan menjadi salah satu dari dua sektor terpenting di luar pertanian, setidaknya hingga paruh kedua abad 19. Pada masa-masa ini, usaha penangkapan ikan laut mengalami perkembangan yang pesat khususnya di kawasan Madura beserta kepulauannya. Perekonomian nelayan mengalami pertumbuhan yang terus meningkat, pendapatan nelayan dapat diasumsikan lebih baik dibandingkan pendapatan rata-rata petani ataupun pendapatan buruh harian di perusahaan-perusahaan perkebunan.

Pada periode ini terdapat beberapa proses pengolahan dan pengawetan ikan yang lazim dilakukan oleh nelayan di Hindia-Belanda dengan cara pengasinan, *pemindangan*, dan pengasapan. Dalam hal ini garam dibutuhkan sebagai bahan utama pengolahan dan pengawetan ikan agar dapat bertahan lama, sementara penggunaan es masih belum dikenal (Masyhuri, 1995). Tersedianya dan tidaknya garam pada gilirannya sangat menentukan terhadap perkembangan usaha penangkapan ikan. Dengan kata lain, semakin terdapat garam untuk pengolahan ikan dan semakin baik sistem pengawetan yang dilakukan maka produksi ikan yang dihasilkan semakin dapat bertahan cukup lama dari pembusukan dan kesempatan pendistribusian ikan pun menjadi semakin luas pula.

Faktor terpenting yang mempengaruhi keadaan tersebut adalah terintegrasinya sektor perikanan ke dalam sistem ekonomi sewa (*pachtselsel*), yakni sistem ekonomi yang muncul di daerah-daerah jajahan Asia Tenggara pada masa-masa abad 19 (Masyhuri, 2009). Desentralisasi kekuatan-kekuatan politik yang cukup tajam dan terbatasnya kemampuan pemerintah jajahan dalam mengumpulkan perolehan dari sektor pajak mendorong untuk melakukan kompromi, beraliansi dengan pihak ketiga sebagai perantara pajak. Dengan uang sewa tertentu yang dibayarkan kepada pemerintah, penyewa (*cadok*) memiliki hak untuk melakukan penarikan pajak atas pemukiman nelayan tertentu yang disewa sekaligus memperoleh hak istimewa pembelian garam dengan harga murah dari pemerintah untuk pengawetan ikan. Tidak saja sektor penangkapan ikan, sistem sewa semacam ini diterapkan pula di sektor-sektor lainnya. Dalam hal ini pemerintah melakukan aliansi dengan golongan Cina yang secara sosial-ekonomis memiliki kedudukan kuat dibandingkan dengan masyarakat lokal. Orang Cina menempati posisi penting dalam sistem ekonomi sewa di kalangan masyarakat nelayan, mereka juga bertindak sebagai penyalur utama barang-barang dan jasa kepada penguasa kolonial (Semedi, 2003).

Namun demikian, pemerintah Hindia-Belanda dengan berbagai pertimbangan mulai mengeluarkan keputusan mengenai penghapusan sistem ekonomi sewa sektor perikanan pada tahun 1864. Dengan dihapuskannya sistem ekonomi sewa menciptakan suatu perubahan struktural pada usaha penangkapan ikan, para nelayan kesulitan dalam mendapatkan modal usaha. Sebagai akibatnya, produksi ikan pada masa-masa ini menurun dan kemerosotan usaha penangkapan ikan pun terjadi. Kondisi seperti ini mencapai puncaknya pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dimana sektor usaha penangkapan ikan mengalami proses deindustrialisasi.

Penelitian tentang nelayan di Pulau Sapeken sebelumnya dilakukan oleh Adawiyah terkait pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sapeken Kec. Sapeken Kab. Sumenep Madura. Kajian ini lebih berfokus pada upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang muncul di kalangan nelayan, yakni tentang ketersediaan modal usaha bagi nelayan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Umrawati yang membahas tentang perilaku nelayan Desa Sapeken, Kec. Sapeken Kab. Sumenep (studi kasus nelayan potasium di Kepulauan Desa Sapeken, Kec. Sapeken. Kab. Sumenep) ([Gambar 1](#)). Kajian ini berfokus pada teknik penangkapan ikan yang menggunakan potasium, persaingan antar sesama nelayan dalam menangkap ikan menjadi faktor terjadinya perilaku seperti ini. Akibatnya kerusakan terjadi tidak hanya pada ekosistem laut, melainkan juga berdampak pada hubungan sosial antar sesama nelayan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Danial dan Setiadi yang berjudul "Interaksi Nelayan Mandar dan Madura Kangean: Studi Kasus Interaksi Sosial di Kepulauan Kangean Kec. Sapeken, Kab. Sumenep, Prov. Jawa Timur". Penelitian ini memaparkan tentang pola interaksi yang terjadi di kalangan nelayan Sapeken dengan nelayan dari wilayah lainnya ([Danial, 2014](#); [Adawiyah, 2015](#)).

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya di atas, kajian tentang nelayan Pulau Sapeken lebih berfokus pada perilaku nelayan, kondisi sosial dan permasalahan yang dihadapi oleh nelayan. Penelitian tentang pola hubungan yang terjadi antara nelayan dan pemilik modal yang berpengaruh pada produktivitas usaha penangkapan ikan belum ada. Permasalahan tentang bagaimana strategi atau cara nelayan Sapeken dapat keluar dari lingkaran permasalahan yang dihadapinya sama sekali tidak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Batasan lingkup temporal awal dalam penelitian ini adalah 1904 ditandai dengan menguatnya peran *punggawa* sebagai kelompok pelepas uang yang menyediakan modal bagi nelayan. Sedangkan batasan akhir yang digunakan dalam penelitian ini pada tahun 1914, yakni munculnya organisasi sosial-ekonomi di kalangan nelayan yang berusaha tidak terikat terhadap dominasi kelompok pelepas uang dan mencoba untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan usaha penangkapan ikan serta dibentuknya bentuk Dinas Perikanan (*Afdeeling Visscherij*) di Hindia Belanda. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang keberadaan lembaga pembiayaan non formal serta peran pentingnya dalam usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken.

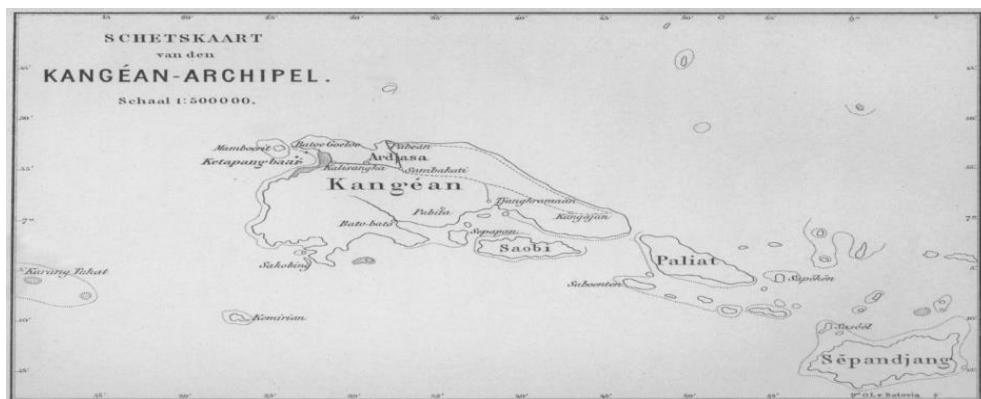
METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi ([Kuntowijoyo, 2013](#)). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika usaha penangkapan ikan Pulau

Sapeken dari tahun 1904-1914, latar belakang sistem ekonomi yang mempengaruhi dan pihak-pihak yang terlibat dalam sektor usaha penangkapan ikan dijelaskan secara kronologis. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini yakni dokumen pemerintah, arsip, surat kabar, dan tulisan-tulisan sezaman lainnya. Beberapa sumber tersebut yang digunakan misalnya: Koloniaal Tijdschrift, Koloniale Studien, Staatsblad van Nederlandsch-Indie, dan sebagainya. Literatur penunjang lainnya seperti karya Kuntowijoyo dengan judul Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940, kemudian karya Masyhuri yang berjudul Menyisir pantai Utara: Usaha dan perekonomian nelayan di Jawa dan Madura, 1850-1940, dan beberapa literatur penunjang lainnya. Proses verifikasi dan interpretasi diterapkan terhadap sumber agar sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disusun menjadi sebuah tulisan sejarah ekonomi maritim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor terpenting dalam usaha perikanan adalah tersedianya modal usaha, karena pada dasarnya perikanan merupakan suatu bentuk aktivitas perdagangan (Kuntowijoyo, 2002). Semakin besar modal usaha yang ditanamkan, maka semakin besar pula kemungkinan usaha akan berkembang, dan begitu juga sebaliknya. Pada masa sistem ekonomi sewa, peran *cadok* sangatlah sentral dalam bisnis sektor perikanan di Pulau Sapeken. Sistem ekonomi sewa sendiri diberlakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda sejak paruh pertama abad ke-19 pada sektor perikanan, pertanian, dan sektor usaha lainnya. Dalam hal ini pemerintah Hindia-Belanda melakukan kerjasama kompromi dengan pihak kedua (terutama Cina) untuk melakukan penarikan pajak secara berkala (Dick, 1993).



Gambar 1. Peta Kepulauan Kangean 1905

Sumber: Gennep (1905)

Cadok berhasil mengembangkan dan membangun jaringan bisnis sistem sewa, mereka juga senantiasa memperbesar usahanya dengan menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh. Bagi nelayan sendiri, keberadaan *cadok* merupakan kesempatan untuk mendapatkan modal usaha penangkapan ikan. Para *cadok* juga menyediakan dan menyalurkan alat-alat produksi seperti perahu, jaring, dan sebagainya dan menjualnya kepada nelayan dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar (Masyhuri, 1995). Mereka juga menyediakan keperluan kehidupan sehari-hari untuk keluarga nelayan dan para nelayan harus membayarnya dengan angsuran, menyerahkan hasil tangkapan, dan juga menjual ikan hasil tangkapan selebihnya kepada mereka.

Bertumpu pada sistem sewa ini, investasi modal yang tertanamkan pada sektor penangkapan ikan cukup besar dan sebagian besar nelayan Sapeken menjalankan usahanya dengan modal pinjaman. Dalam proses komersialisasi usaha penangkapan ikan, tukang cadok menempati posisi yang sentral. Walaupun bisnis yang mereka kembangkan mengandung resiko yang besar, mereka tetap dapat menikmati keuntungan yang cukup besar. Dalam hal ini dapat dikatakan usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken bersifat sentralistis, yakni menempatkan *cadok* sebagai pusat dari seluruh aktivitas produksi, pengolahan, dan jaringan perdagangan ikan. *Cadok* juga menguasai industri pengolahan dan pengawetan ikan. Seluruh peralatan dalam industri pengawetan dan pengolahan ikan adalah milik tukang cadok, dan mereka umumnya mempekerjakan para pekerja dengan sistem upahan (Kuntowijoyo, 2002).

Di antara para *cadok* lebih banyak terdapat kerjasama daripada persaingan, beberapa *cadok* menyerahkan pemungutan penghasilan yang menjadi haknya kepada para kaki tangan mereka. Dalam hal ini, seorang *cadok* terkadang juga dapat menyewakan daerah wewenangnya atau sebagian dari haknya kepada *cadok* lainnya secara bulanan atau tahunan. Bahkan mungkin juga seorang *cadok* bertindak sebagai kepala dari jaringan atau kongsi “para penyewa pajak bawahan” (Jonge & Suparmin, 1989). Dengan adanya organisasi kerja seperti ini memberikan kesempatan untuk terjadinya pertumbuhan usaha penangkapan ikan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan pun dengan sendirinya akan mengalami peningkatan. Keadaan ekonomi masyarakat nelayan pada periode ini umumnya lebih baik dibandingkan dengan keadaan ekonomi masyarakat petani. Mobilitas sosial vertikal cukup tinggi dan banyak nelayan *pandega* yang semula tidak memiliki perahu, menjadi juragan laut yang memiliki perahu (Masyhuri, 2009).

Sistem ekonomi sewa sendiri dihapus pada tahun 1864 oleh pemerintah Hindia-Belanda dan secara bertahap *cadok* tidak lagi menempati posisi sentral dan mulai kehilangan perannya di sektor penangkapan ikan. Investasi modal mengalami penurunan drastis, dan bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Para nelayan kesulitan mendapatkan modal usaha dan bahkan Pulau Sapeken pada periode ini banyak ditinggalkan oleh penduduknya. Pada tahun 1845 jumlah penduduk di Pulau Sapeken mencapai sekitar 1.078 jiwa, dan setelah adanya kebijakan penghapusan sistem sewa tersebut jumlah penduduk yang menghuni Pulau Sapeken hanya 169 jiwa (Bleeker, 1870).

Setelah penghapusan sistem ekonomi sewa, nelayan Pulau Sapeken mulai membangun organisasi kerja secara mandiri. Mereka umumnya berusaha untuk tetap bertahan dengan modal patungan di antara para nelayan. Meskipun demikian, tetap saja keadaan tidak berubah. Pendapatan nelayan terus mengalami penurunan dan mobilitas vertikal menurun pun banyak terjadi khususnya pada para juragan dan keadaan ini bertahan setidak-tidaknya hingga menjelang tahun 1880-an. Banyak penduduk yang meninggalkan Pulau Sapeken, sebagian besar dari mereka melakukan migrasi terutama ke daerah-daerah yang menawarkan pekerjaan di sektor pertanian. Ada juga yang menjadi buruh musiman di perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Jawa Timur seperti Jember, Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi (Kuntowijoyo, 2002).

Munculnya Elite Nelayan dan Produktivitas Usaha Penangkapan Ikan

Penghapusan sistem ekonomi sewa membuat para *cadok* lenyap dari sektor perikanan Pulau Sapeken, kondisi ini menghadirkan momentum bagi kelompok pelepas uang sebagai pihak yang menyediakan modal bagi nelayan. Kelompok pelepas uang dikenal dengan sebutan *punggawa* yang berasal dari kelompok masyarakat elit setempat. Kedudukan *punggawa* sangatlah sentral dalam usaha perikanan, selain memiliki modal yang banyak mereka juga menjalin hubungan baik dengan para petugas penyalur garam. Keterlibatan para *punggawa* ini pada perkembangannya menciptakan suatu kondisi monopoli pada usaha penangkapan ikan di kalangan masyarakat nelayan. Usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken pada akhir abad ke 19 telah dikuasai oleh empat orang *punggawa*, mereka menanamkan modal kepada para juragan (Kuntowijoyo, 2002). Setidak-tidaknya sampai tahun 1910-an kedudukan *punggawa* dalam usaha penangkapan ikan sangatlah kuat. *Punggawa* menjalin hubungan baik dengan para petugas penyalur garam dan mereka juga menyediakan semua peralatan yang dibutuhkan dalam industri pengolahan dan pengawetan ikan. Peralatan-peralatan tersebut seperti tungku-tungku (besi atau logam) untuk pengolahan ikan pindang, dan ruangan untuk tempat pengasinan ikan (Masyhuri, 1995).

Kelompok *punggawa* berhasil melakukan pengontrolan terhadap pengolahan ikan, distribusi perdagangan ikan, dan bahkan transportasi pengiriman ikan terutama ke daerah Bali. Akibat dari penguasaan atas monopoli usaha penangkapan tersebut, kehidupan para nelayan terus mengalami kemunduran. Pendapatan nelayan menurun akibat dari harga ikan rendah, dan lebih parahnya lagi usaha penangkapan di wilayah ini tidak dapat lagi memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (Masyhuri, 1995). Dalam hal perdagangan ikan, nelayan tidak memiliki kesempatan lain untuk melakukan perdagangan secara mandiri. Mereka umumnya mengalami kesulitan baik dari segi keterbatasan modal maupun dalam hal transaksi yang dilakukan secara kredit terhadap pedagang pengecer. Terlebih lagi, mereka juga tidak memiliki kesempatan dalam membangun jaringan perdagangan dengan wilayah lain akibat adanya pengawasan yang ketat oleh aparat pemerintah. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat kondisi seperti ini yakni terjadinya penurunan produksi ikan, beberapa produksi ikan seperti ikan asin (*kannas*) dan ikan kering sempat mengalami penurunan produksi pada masa-masa awal penyaluran garam bersubsidi tahun 1908.

Tabel 1. Produksi Ikan di Pulau Sapeken

Tahun	Jenis Ikan			Nilai (gulden)
	Ikan kering (pikul)	Ikan pindang (<i>blikken</i>)	Ikan asin (<i>stuks</i>)	
1904	8.547	19.423	2.231	f264.500
1905	8.056	9.811	1.184	f226.00
1906	10.752	6.351	5.418	f277.000
1907	6.496	10.353	512	f175.000
1908	2.709	10.109	4.156	f109.000
1909	2.821	10.545	4.706	f115.000
1910	2.140	11.766	2.192	f86.000
1911	4.043	13.470	3.604	f128.000
1912	4.615	14.526	6.575	f152.000
1913	3.608	18.210	3.485	f132.000
1914	3.457	29.710	974	f147.000

Sumber: Plas (1920)

Berdasarkan [tabel 1](#) tersebut dapat diketahui bahwa produksi ikan khususnya ikan kering dan ikan asin di Pulau Sapeken terus mengalami penurunan hingga tahun 1910, sementara ikan pindang justru melonjak naik setidaknya setelah mengalami produksi rendah pada tahun 1906. Kebijakan monopoli garam yang diterapkan oleh pemerintah pada tahun 1908 sangat mempengaruhi terdapat produksi ikan terutama ikan kering dan ikan asin, karena kedua jenis ikan ini banyak memerlukan garam sebagai bahan dasar utama dari pengolahan dan pengawetan. Akibat adanya penyaluran garam bersubsidi menjadikan para nelayan sulit untuk memperoleh garam, berbeda dengan sebelumnya para nelayan dapat dengan mudah memperoleh garam dari Sulawesi. Pada masa-masa ini, dapat dikatakan bahwa apa yang disebut *technoware*, *humanware*, *infoware*, dan *orgaware* sektor penangkapan ikan mengalami keterpurukan ([Parwoto, 2018](#)).

Pada dasarnya penyaluran garam bersubsidi yang diterapkan oleh pemerintah memiliki tujuan untuk agar biaya produksi ikan dapat diperkecil, pendapatan nelayan mengalami kenaikan, dan dapat memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan serta membatasi perdagangan garam gelap. Apabila kebijakan tersebut berhasil, maka pemerintah akan memperoleh keuntungan dan pemasukan yang cukup besar dari sektor ini. Nelayan merupakan pembayar pajak tertinggi per kapita, dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Seperti pada tahun 1871 terdapat 16.265 nelayan membayar pajak masing-masing f7,56, dibandingkan dengan pedagang yang membayar pajak f1,62, pengusaha pabrik f4,69, dan pengusaha transportasi pelabuhan laut f7,30. Separuh dari seluruh pembayar pajak usaha adalah nelayan; pada tahun 1903, dari sejumlah 58.197 pembayar pajak di Hindia Belanda, 7.321 diantaranya berasal dari pemilik perahu dan 28.387 berasal dari nelayan ([Kuntowijoyo, 2002](#)). Namun demikian, berbagai pembatasan juga diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan garam bersubsidi yang berakibat pada kurang maksimalnya kebijakan tersebut kepada para nelayan.

Sementara untuk ikan pindang masih bisa bertahan dari dampak adanya penyaluran garam bersubsidi, hanya pada tahun 1906 nilai produksinya menurun sebesar 6.541 dan pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan sampai pada tahun 1914 naik tiga kali lipat sebesar 29.710 ([Parwoto, 2018](#)) ([Tabel 2](#)). Terdapat

beberapa hal yang menyebabkan nilai produksi produksi ikan pindang pada masa-masa krisis garam tetap terjaga eksistensinya, salah satunya adalah fleksibilitasnya dalam penggunaan garam pada saat proses pengolahan dan pengawetannya.

Pemindangan merupakan pola pengawetan yang dilakukan dengan cara merebus ikan selama beberapa waktu, dan tidak dapat dilakukan dalam jumlah besar-besaran. Jumlah garam yang digunakan pada proses pengawetan sangat bervariasi, semakin banyak garam yang digunakan untuk membubuhkan ikan semakin lama pula ikan pindang dapat bertahan dari pembusukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila produksi ikan pindang masih tetap menunjukkan eksistensinya pada waktu terjadi krisis garam daripada ikan asin dan ikan kering.

Tabel 2. Jumlah garam yang digunakan untuk pengawetan ikan di Pulau Sapeken 1904-1914

Tahun	Jumlah Garam	Nilai (gulden)
1904	15.627	f1250.18
1905	17.555	f1404.46
1906	12.492	f999.36
1907	10.942	f875.36
1908	15.133	f1210.64
1909	26.883	f2150.68
1910	37.613	f3009.06
1911	41.760	f3340.80
1912	42.100	f3368.00
1913	43.860	f3508.80
1914	45.580	f3646.40

Sumber: Plas (1920)

Adanya kelompok *punggawa* di Sapeken membawa sektor usaha penangkapan ikan di wilayah ini ke arah monopoli dan membuat nelayan tidak dapat terlepas dari hegemoninya. Kepemilikan modal yang kuat dan menjalin hubungan baik dengan petugas-petugas penyalur garam menjadikan kelompok *punggawa* memiliki posisi sentral dalam sektor ini. Mulai dari kontrol terhadap pengolahan ikan, pendistribusian ikan, serta pembelian dan perdagangan ikan. Kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan bukan merupakan industri rumah tangga, melainkan sebagai industri yang dikuasai oleh para *punggawa*.

Dalam melakukan kegiatan pengolahan dan pengawetan ikan *punggawa* menggunakan jasa dari tenaga-tenaga buruh upahan yang dikenal dengan sebutan *pandega Bali* (para nelayan yang bekerja kepada *punggawa*), mereka mengerjakan dan mengolah ikan milik *punggawa* sekaligus sebagai pengantar produksi ke daerah-daerah pemasaran terutama ke Bali (Plas, 1920). Kelompok *punggawa* juga menguasai jalur transportasi pengiriman ikan dengan armada perahunya yang dikenal dengan sebutan *pelaris*, dan tujuan utamanya dari pemasaran ikan adalah Bali dan Panarukan. Untuk pemasaran wilayah Bali, para *punggawa* membangun koneksi perdagangan dengan para pedagang ikan *Cina* di daerah Buleleng dan Sangsit. Sementara untuk Panarukan, para *punggawa* juga menjalin hubungan dengan dua penguasa dagang *Cina* yang dikenal dengan sebutan Baba Bi Tjoeng dan Baba Kopoh (Masyhuri, 1995). Pemasaran ikan yang dilakukan oleh kelompok *punggawa* bukan hanya dengan Bali dan Panarukan, mereka juga menguasai jalur

pemasaran produksi skala lokal. Wilayah-wilayah di sekitar Kepulauan Sapeken seperti Raas, Gayam, Gowa-gowa dan Kangean, merupakan sasaran dari pemasaran produksi ikan oleh *punggawa*, bahkan kebutuhan ikan di Sumenep daratan juga disuplai oleh perikanan yang berasal dari Sapeken.

Organisasi usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken berawal dari *punggawa* yang memberikan modalnya kepada para juragan, kemudian juragan menjual hasil tangkapannya sebesar 5/12 kepada *punggawa* (Plas, 1920). Selanjutnya *punggawa* bergantung pada majikan (*tauke*) yang merupakan pedagang-pedagang besar yang menguasai pasar pada wilayah-wilayah tertentu (Anwar & Wahyuni, 2019). Akibat adanya sistem perekonomian yang demikian ini, kepemilikan kelompok terhadap sarana produksi sangatlah terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sejak tahun 1908 sampai tahun-tahun berikutnya semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali dan beralih kepada pola kepemilikan individu yakni *punggawa*. Kelompok *punggawa* dan juragan pada perkembangannya semakin menduduki posisi yang kuat dalam usaha penangkapan ikan, umumnya mereka mampu berinvestasi dengan baik. Sarana produksi yang sebelumnya dibeli dengan menggunakan uang pinjaman berubah menjadi milik juragan, sementara sebagian nelayan tetap sebagai nelayan tanpa kepemilikan sarana produksi. Kepemilikan sarana produksi bagi pelaku usaha penangkapan ikan sangatlah penting, sebab pada gilirannya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi pemiliknya (Masyhuri, 1995).

Sebagai catatan, sebenarnya pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1900 telah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap sektor perikanan. Berbagai perubahan-perubahan terus dilakukan agar dapat mendorong tumbuh usaha penangkapan ikan, salah satunya dengan menempatkan masalah perikanan di bawah wewenang Departemen Pertanian. Pada tahun 1905, Departemen Pertanian mendirikan lembaga *Het Visscherij Station* di Jakarta dan pada tahun 1914 berhasil membentuk Dinas Perikanan (*Afdeeling Visscherij*) (Soegiarto, 1987).

Dalam rangka memajukan usaha perikanan di Hindia Belanda, pemerintah secara serius menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan perikanan seperti perkreditan, pendirian pusat pengasinan ikan, pembangunan dan perbaikan pasar ikan, penyuluhan masalah perikanan, penyaluran garam subsidi, pembangunan pelabuhan-pelabuhan pendaratan ikan (Syafi'i, 2013); seperti pada tahun 1912 di Pasongsongan yang letaknya di sebelah Barat Utara Sumenep, pemerintah mengalokasikan dana sebesar f200.000 untuk merenovasi pelabuhan, tetapi kontraktor rupanya membutuhkan f300.000 (Kuntowijoyo, 2002).

Kembali lagi ke permasalahan yang dialami oleh para nelayan, investasi modal yang berasal dari kredit pemerintah maupun dari para kelompok *punggawa* tidak banyak mengalami perubahan. Sebagian besar kredit tersebut hanya tersalurkan pada kelompok-kelompok tertentu yang secara sosial politik dan ekonomi menempati posisi yang menguntungkan, sedangkan kredit untuk nelayan sendiri jumlahnya sangat terbatas. Bank Kangean yang merupakan cabang dari *Soemenepsche Afdeelingsbank* hanya menyalurkan kredit kepada nelayan-nelayan yang menghasilkan dan mengapalkan *kannas* (ikan asin), kredit yang diberikan merupakan uang muka sebelum ikan terjual yang besarnya f6 per seribu ikan *kannas*. Mereka berada dalam pengawasan *Panarukansche Afdeelingsbank* dan

harus secepat mungkin melunasi hutang kepada bank perwakilan yang dimaksud setelah ikan yang dibawanya terjual (Plas, 1920).

Kelompok juragan pada umumnya berpendapatan cukup dan bahkan lebih dari cukup, sebab apabila dilihat dari kepemilikan atas sarana produksi menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan kondisi perekonomian kelompok juragan sangatlah baik. Para kelompok juragan mengalami mobilitas sosial ke atas, melalui pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya juragan mampu mencapai posisi dari nelayan yang tidak bermodal menjadi nelayan yang bermodal. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian tidak mau lagi melaut, dan beralih status menjadi juragan darat (Juliantono & Munandar, 2016).

Akibat dari pola investasi yang terpusat pada *punggawa* dan aliran modal hanya terfokus pada para juragan, harga ikan dan pendapatan nelayan menjadi rendah. Apabila pada tahun 1870-an pendapatan per kapita nelayan mencapai 48 sen per hari atau f 3 per tahun, pada masa-masa ini pendapatan per kapita tersebut telah turun menjadi 16,6 sen per hari atau f0,60 per tahun (Masyhuri, 2009). Produksi ikan Sapeken yang dikirim ke luar wilayah mengalami penurunan khususnya ikan pindang, dan ikan asin (*kannas*). Seringkali terjadi kesenjangan sosial ekonomi di antara kelompok *punggawa*, juragan, dan nelayan yang berdampak pada penurunan jumlah nelayan di Pulau Sapeken.

Usaha penangkapan ikan bagi nelayan bukan lagi sesuatu yang bisa diharapkan untuk mendapatkan keuntungan, banyak nelayan yang meninggalkan Pulau Sapeken. Dalam waktu 4 tahun sejak penyaluran garam bersubsidi, jumlah penduduk menyusut dari 6.800 jiwa menjadi 3.700 jiwa (Kempen, 1922). Mereka kebanyakan melakukan migrasi ke daerah-daerah seperti Besuki, Bondowoso, Jember, Banyuwangi dan daerah-daerah lainnya yang menyediakan lapangan pekerjaan (Jonge & Suparmin, 1989). Pembukaan lahan-lahan perkebunan yang banyak dilakukan pada akhir abad 19 telah banyak menyerap tenaga kerja musiman ataupun permanen, yang secara tidak langsung memberikan harapan kesejahteraan yang lebih baik dari daerah asalnya (Parwoto, 2018). Oleh karena itu, alasan tersebutlah yang memungkinkan banyak nelayan Sapeken pada periode pertama abad ke 19 memilih meninggalkan pulau dan hijrah ke daerah-daerah lain.

Sampai di sini beberapa hal dapat diketahui bahwa pada kalangan masyarakat nelayan Sapeken setidaknya terdapat tiga golongan dalam stratifikasi sosial usaha penangkapan ikan. Mereka terdiri dari juragan darat dan juragan laut, kelompok pelepas uang (*punggawa*), dan *pandega* (ABK). Kelompok juragan darat dan juragan laut memiliki posisi sosial ekonomi yang cukup berpengaruh bagi kalangan masyarakat nelayan, bersama dengan kelompok pelepas uang (*punggawa*) mereka dapat disebut sebagai kelompok elit nelayan. Sementara kelompok *pandega* atau para nelayan itu sendiri umumnya hanya memiliki peran dalam hal penangkapan ikan di laut, mereka tidak terlibat dalam urusan organisasi perikanan seperti kelompok juragan dan *punggawa*. Para nelayan umumnya bergantung pada organisasi kerjasama yang dilakukan oleh *punggawa* dan juragan, dan mereka cenderung tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan jaringan usahanya sendiri. Kesempatan dalam membangun jaringan perdagangan ikan juga praktis sulit untuk dilaksanakan akibat adanya kontrol dan pengawasan, keterbatasan akses dan modal dalam membangun usaha ini jelas menjadi kendala tersendiri bagi para nelayan.

Munculnya Organisasi Nelayan

Pertumbuhan usaha penangkapan ikan di Jawa dan Madura pada perempat pertama abad ke 20 ditandai oleh perubahan penting, yakni kemunculan organisasi-organisasi sosial ekonomi di kalangan nelayan (Widodo, 2007). Melalui organisasi ini, nelayan mencoba untuk memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan usaha penangkapan ikan yang dialaminya. Adanya organisasi ini bukan saja sebagai bentuk reaksi terhadap dominasi kelompok-kelompok tertentu, akan tetapi juga menjadi momentum pertumbuhan dan peningkatan produksi usaha penangkapan ikan. Keberadaan organisasi sosial ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan politik luar, semangat kebangsaan semakin gencar digalakkan menyusul kemunculan gerakan-gerakan emansipasi bangsa Indonesia.

Propaganda yang dilancarkan organisasi-organisasi pergerakan nasional dalam bentuk gerakan perkoperasian di kalangan masyarakat nelayan sedang meluap-luap, mendorongnya untuk melakukan perubahan terhadap kondisi mereka yang kurang menguntungkan. Pada masa sebelumnya hampir semua masyarakat nelayan pantai utara Jawa dan Madura berada dalam hegemoni kelompok pelepas uang. Oleh karena itu, organisasi sosial ekonomi pertama didirikan dalam bentuk koperasi pada tahun 1912 di kalangan nelayan Tegal (Masyhuri, 1995).

Berdirinya organisasi koperasi di kalangan nelayan Tegal, telah memicu munculnya organisasi serupa di lingkungan nelayan pantai utara Jawa dan Madura. Pada awal tahun 1914 berdiri juga organisasi sosial ekonomi dalam bentuk koperasi di kalangan nelayan Sapeken, tidak jelas siapa pelopornya namun kemungkinan besar adalah para nelayan itu sendiri (Plas, 1920). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken sepenuhnya di monopoli oleh kelompok *punggawa* yang mengalirkan modalnya kepada kelompok juragan. Dengan kepemilikan modal yang sangat kuat dan berhubungan baik dengan petugas penyalur garam setempat, mereka berhasil menguasai jalur perdagangan ikan, pengolahan dan distribusi ikan ke daerah pemasaran-pemasaran, serta menguasai sarana produksi usaha penangkapan ikan.

Hampir semua nelayan terikat oleh pola monopoli kelompok *punggawa*, dominasi seperti ini sangat membawa dampak yang sangat signifikan bagi nelayan. Harga ikan menjadi jatuh, perekonomian nelayan memburuk akibat rendahnya pendapatan, dan yang paling penting adalah usaha penangkapan ikan di Sapeken sudah tidak lagi memberikan kesempatan untuk memperoleh keuntungan (Plas, 1920). Kondisi tersebut mendorong para nelayan untuk membentuk organisasi sosial ekonomi, dengan asumsi dapat menggeser pola investasi yang dijalankan oleh *punggawa*. Selain itu, harapan lain dengan adanya organisasi ini adalah untuk mematahkan monopoli kelompok *punggawa* serta mendorong kemajuan usaha penangkapan ikan di wilayah Pulau Sapeken. Tentu apabila hal tersebut berjalan baik, maka nelayan akan memperoleh keuntungan dan juga kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Pola perdagangan yang berlaku dengan adanya organisasi ini yakni dengan cara menempatkan organisasi koperasi sebagai pusat pelelangan ikan, para nelayan terikat untuk menjual ikan hasil tangkapan. Hal seperti ini juga berlaku pada organisasi-organisasi nelayan yang ada di pantai utara Jawa dan Madura, para anggota organisasi diharuskan menjual ikan hasil tangkapannya kepada koperasi. Sumber keuangan koperasi yang dipinjamkan berupa

modal kepada nelayan diperolehnya dari bank secara kredit sebesar f150.000 per tahunnya dan untuk melunasinya sesama anggota koperasi menanggungnya secara bersama-sama (Plas, 1920). Jadi dengan kata lain nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan dapat memperoleh modal dari koperasi dan untuk melunasi hutang tersebut mereka tidak perlu membayarnya sendiri, melainkan sesama anggota koperasi menanggung hutang yang diperolehnya dari bank. Tentu dalam hal ini mereka para nelayan juga berkewajiban untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada koperasi.

Organisasi memiliki tugas yang sangat kompleks, mulai dari perkreditan, penjualan ikan, penyaluran garam, dan tentunya pemberdayaan nelayan. Anggota dewan koperasi terdiri dari 5 warga Sapeken dan juga anggota gabungan dari luar pulau, mereka memiliki tugas dalam hal mengawasi dan mengontrol masalah administrasi dan membuat laporan tahunan untuk pertanggungjawaban setiap bulannya. Pengangkatan dan pengunduran diri setiap anggota berada di bawah wewenang Bank cabang Kangean, dan di berbagai pelabuhan terutama Bali dan Jawa Timur terdapat agen atau petugas koperasi yang melakukan kontrol terhadap penjualan ikan di tempat-tempat pendaratan ikan (Plas, 1920).

Penjualan ikan kepada koperasi dikenakan potongan harga sebesar 1/13 untuk biaya transportasi ke daerah pemasaran, 2/13 untuk *pandega Bali* yang terlibat dalam proses pengolahan dan pengiriman ikan, 1/13 untuk *pandega Bali* yang hanya terlibat dalam proses pengawetan ikan. Sisanya, setelah dikurangi biaya operasional, pembayaran hutang, dan biaya lainnya, merupakan hak dan pendapatan nelayan sepenuhnya (Masyhuri, 1995).

Munculnya organisasi nelayan dan tempat pelelangan ikan tersebut memicu tumbuhnya pola perdagangan bebas, para pedagang memiliki beragam pilihan dalam melakukan transaksi yang berpusat di pelelangan ikan. Penjualan ikan melalui tempat pelelangan ikan jelas merupakan salah satu pilihan bagi nelayan di samping perdagangan dengan pola “kerumunan” jual beli yang berpusat pada pedagang ikan (Merliya & Ikhwan, 2019). Kondisi yang demikian membawa dampak positif bagi usaha penangkapan ikan, harga ikan umumnya membaik dan pendapatan nelayan dengan sendirinya mengalami peningkatan pula.

Harga ikan bambangan yang sempat menurun tajam selama terjadinya monopoli oleh punggawa dari sebesar f30,- menjadi sekitar f20,- per 100 ekor, mengalami peningkatan kembali setelah perdagangan bebas menjadi sekitar f29,- sampai f33,- per 100 ekor. Bahkan pedagang dari Gua-gua (Sulawesi) mau membelinya dengan harga f 35,- per 100 ekor, dan penjualan ikan di pasar-pasar di Bondowoso pada tahun 1915 mencapai harga f50,- per pikul. Harga ikan jenis lainnya juga mengalami peningkatan dari sebesar f15,- per 1000 ekor pada tahun 1913 menjadi sebesar f30,- per 1000 ekor pada tahun 1915 (Plas, 1920). Persaingan yang sering terjadi antar pedagang dan antar punggawa menjadi salah satu pendorong meningkatnya harga ikan.

Sampai di sini menjadi jelas bahwa kemajuan sektor penangkapan ikan berkaitan erat dengan kondisi yang di dalamnya tercipta interaksi yang dinamis dan simultan antara empat komponen; *technoware, humanware, infoware, dan orgaware* (Paillin, 2013). Apabila interaksi yang dinamis dan simultan tersebut dapat terlaksana, maka usaha penangkapan ikan dapat dilakukan secara mudah, efisien dan dapat mencapai produktivitas tinggi, yang pada gilirannya akan mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat nelayan.

Dengan demikian, sektor penangkapan ikan selama menjelang perempat pertama abad 20 mengalami perubahan-perubahan penting. Persoalan yang terjadi dalam kurun waktu 1906-1912 dengan adanya monopoli kelompok *punggawa*, mulai tergeser oleh kemunculan organisasi nelayan pada tahun 1914 (Kempen, 1922). Dengan kemunculan organisasi tersebut berkembang pula perdagangan bebas yang berpusat pada tempat-tempat pelelangan ikan. Penyaluran kredit dari bank pemerintah dapat menjangkau lapisan masyarakat nelayan lebih luas, bank pemerintah juga menjadi alternatif sumber modal bagi nelayan (Widodo, 2007). Dengan adanya pola investasi seperti ini, pendapatan sektor penangkapan ikan mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Munculnya organisasi nelayan di Pulau Sapeken mendorong terjadinya peningkatan dan meluasnya jangkauan jaringan perdagangan ikan. Pada masa-masa ini distribusi perdagangan ikan Pulau Sapeken telah mampu menjangkau daerah-daerah seperti Bali, Panarukan, Sapeken, dan Sulawesi. Bahkan produksi kerang loklak Sapeken telah diekspor dalam jumlah yang besar ke Lombok, Sumbawa, hingga Singapura (Plas, 1920).

KESIMPULAN

Dinamika usaha penangkapan ikan bagi masyarakat Pulau Sapeken dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah; Pertama sistem ekonomi sewa yang menempatkan cadok sebagai kelompok pemilik modal menguasai keseluruhan aspek organisasi usaha penangkapan ikan. Dalam konteks ini cadok berperan sebagai motor penggerak pada sektor usaha penangkapan ikan di Pulau Sapeken, sehingga sektor ini dapat tumbuh dan berkembang. Kedua kelompok *punggawa* (*rentenir/pelepas uang*) yang muncul setelah dihapuskannya sistem ekonomi sewa yang berperan sebagai institusi penyedia modal bagi nelayan dalam bentuk uang pinjaman secara perorangan. Ketiga, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1908 tentang penyaluran garam bersubsidi yang menjadikan para nelayan sulit untuk memperoleh garam, sehingga berdampak pada produksi ikan karena garam merupakan bahan dasar utama dari pengolahan dan pengawetan. Usaha penangkapan ikan baru menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak hilangnya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu dan munculnya organisasi nelayan pada awal tahun 1914.

DAFTAR RUJUKAN

- Adawiyah, A. (2015). *Pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Sapeken Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep Madura* [Thesis, University of Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/23846/>
- Anwar, Z., & Wahyuni, W. (2019). Miskin di laut yang kaya: nelayan Indonesia dan kemiskinan. *SOSIORELIGIUS: JURNAL ILMIAH SOSIOLOGI AGAMA*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v4i1.10622>
- Bleeker, P. (1870). *Nieuwe bijdragen tot de kennis der bevolkingstatistiek van Java*. Martinus Nijhoff.
- Danial, S. F. I. (2014). *Interaksi nelayan Mandar dan Madura Kangean: studi interaksi sosial di Kepulauan Kangean Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur*. [Magister Thesis. Universitas Gadjah Mada].

- Dick, H. (1993). A fresh approach to Southeast Asian history. In J. Butcher & H. Dick (Eds.), *The rise and fall of revenue farming: business elites and the emergence of the modern state in southeast asia* (pp. 3–18). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-22877-5_1
- Gennep, J. L. van. (1905). Bijdrage tot de kennis van den Kangean-Archipel. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 46(1)*, 89–108.
- Jonge, H. de, & Suparmin (Eds.). (1989). *Agama, kebudayaan dan ekonomi: studi-studi interdisipliner tentang masyarakat Madura* (Cet. 1). Rajawali.
- Juliantono, F. J., & Munandar, A. (2016). Fenomena kemiskinan nelayan: perspektif teori strukturasi. *POLITIK, 12(2)*, 1858-1866
- Kempen. (1922). Boekbespreking: visscherij en vischteelt in Nederlandsch-Indië. *Koloniale studiën, 06(01)*. <https://colonialarchitecture.eu/obj?sq=id%3Auuuid%3A315f-6af0-c06f-4b45-8c05-6a182db67316>
- Kuntowijoyo. (2002). *Perubahan sosial dalam masyarakat agraris Madura, 1850-1940* (Cet. 1). Matabangsa bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation : Distributor, Lintasbuku.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Masyhuri. (1995). *Menyisir Pantai Utara: usaha dan perekonomian nelayan di Jawa dan Madura, 1850-1940*. Yayasan Pustaka Nusatama bekerjasama dengan Perwakilan KITLV, Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde.
- Masyhuri (Ed.). (2009). Iptek dan dinamika ekonomi nelayan. In *Kembara bahari: Esei kehormatan 80 tahun Adrian B. Lapian* (Cet. 1). Komunitas Bambu.
- Merliya, M., & Ikhwan, I. (2019). Pola interaksi sosial pedagang dengan nelayan di Pasar Ikan Pantai Purus Padang Kecamatan Padang Barat. *Jurnal Perspektif, 2(4)*, Article 4. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v2i4.159>
- Paillin, D. B. (2013). Analisis kontribusi komponen teknologi dalam usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Seram bagian barat. *Jurnal Teknik Industri, 7(1)*.
- Parwoto, P. (2018). Dampak monopoli garam di Madura pada abad XX. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1)*. <https://doi.org/10.2-1831/moz.v7i1.6182>
- Plas, Van der. (1920). De visscherij en de vischhandel in den Kangean en Sapoedi archipel. *Koloniaal Tijdschrift, 09(1)*, 611–632.
- Semedi, P. (2003). *Close to the stone, far from the throne: The story of a Javanese fishing community, 1820s-1990s* (1st. ed). Benang Merah.
- Soegiarto, K. A. (1987). Menelusuri tonggak-tonggak sejarah PUSLITBANG Oseanologi-LIPI. *Oseana, XII, 3, 1-52*.
- Syafi'i, I. (2013). Persaingan pengangkutan garam di Selat Madura tahun 1924-1957. *Jurnal Sejarah CITRA LEKHA, XVII(1)*, 85–104.
- Tjiptoatmodjo, F. A. S. (1983). *Kota-kota pantai di sekitar selat Madura (abad XVII sampai medio abad XIX)*. [Magister Thesis. Universitas Gadjah Mada]

- Utomo, A. A. P. (2017). Potensi bahari Lasem sebagai sejarah maritim lokal. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 11(2), 141–150. <https://doi.org/10.17977/um020v11i22017p141>
- Widodo, S. K. (2007). *Dinamika kebijakan terhadap nelayan: tinjauan historis pada nelayan Pantai Utara Jawa 1900-2000*. Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Sastra tanggal 17 Maret, Universitas Diponegoro.